

# *Kajian*

**Menjembatani Teori dan Persoalan Masyarakat dalam Perumusan Kebijakan**

**Vol. 26, No. 2, 2021**

**p-ISSN: 0853-9316 e-ISSN: 2614-3712**

- SURAT SUARA PEMILIH DAN LEGITIMASI PEMILU  
oleh : Prayudi
- KEBIJAKAN BERBASIS BUKTI DAN IBUKOTA BARU INDONESIA  
oleh : Poltak Partogi Nainggolan dan Riris Katarina
- UPAYA PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU MELALUI REVISI UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN  
oleh : Sali Susiana
- PELINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL ATAS BARANG IMPOR MELALUI SISTEM PEREKAMAN DI INDONESIA  
oleh : Trias Papuli Kurnianingrum
- PERBANKAN SYARIAH: URGENSI PENGHAPUSAN UNIT USAHA SYARIAH PADA TAHUN 2023  
oleh : Nidya Waras Sayekti dan Sony Hendra Permana



Diterbitkan oleh  
Pusat Penelitian Badan Keahlian  
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia



# *Kajian*

**Menjembatani Teori dan Persoalan Masyarakat dalam Perumusan Kebijakan**

**Vol. 26, No. 2, 2021**

**p-ISSN: 0853-9316 e-ISSN: 2614-3712**

## DAFTAR ISI

<b>Pengantar Redaksi .....</b>	<b>i</b>
● SURAT SUARA PEMILIH DAN LEGITIMASI PEMILU <i>oleh : Prayudi .....</i>	<b>104 - 121</b>
● KEBIJAKAN BERBASIS BUKTI DAN IBUKOTA BARU INDONESIA <i>oleh : Poltak Partogi Nainggolan dan Riris Katarina .....</i>	<b>122 - 139</b>
● UPAYA PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU MELALUI REVISI UNDANG- UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN <i>oleh : Sali Susiana.....</i>	<b>140 - 153</b>
● PELINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL ATAS BARANG IMPOR MELALUI SISTEM PEREKAMAN DI INDONESIA <i>oleh : Trias Papuli Kurnianingrum .....</i>	<b>154 - 171</b>
● PERBANKAN SYARIAH: URGENSI PENGHAPUSAN UNIT USAHA SYARIAH PADA TAHUN 2023 <i>oleh : Nidya Waras Sayekti dan Sony Hendra Permana.....</i>	<b>172 - 186</b>



## PENGANTAR REDAKSI

Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI kembali menghadirkan Majalah Kajian untuk para pembaca dalam Kajian Vol 26. No. 2 Tahun 2021. Terdapat lima tulisan yang telah terseleksi dari sejumlah tulisan yang disumbangkan baik dari penulis eksternal maupun internal Pusat Penelitian. Tulisan pertama berjudul “Surat Suara Pemilih dan Legitimasi Pemilu”, yang ditulis oleh Prayudi dari Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. Salah satu aspek dari sistem pemilu yang berkaitan erat dengan kedaulatan rakyat adalah mengenai surat suara yang digunakan dalam Pemilu 2024. Penggunaan surat suara bukan hanya bersifat administrasi pemilu, tetapi menjadi bahan bagi bangunan legitimasi pemilu yang bermakna penting secara politik. Berdasarkan pendekatan rekonstruktif interpretivis terhadap rumusan masalahnya, direkomendasikan agar substansi surat suara legitimasi pemilu diarahkan pada akurasi pilihan pemilih terhadap para kandidat dan partai-partai yang bersaing.

Artikel kedua adalah tentang “Kebijakan Berbasis Bukti dan Ibukota Baru Indonesia”, yang ditulis oleh Poltak Partogi Nainggolan dan Riris Katharina dari Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. *Evidence-based policy* (kebijakan berbasis bukti) semakin mengemuka dan memperoleh perhatian belakangan setelah banyak UU digugat oleh masyarakat sipil, terutama kelompok kepentingan, dan diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk dikaji secara yuridis. Persoalannya tidak hanya menyangkut teknik perancangan UU, tetapi lebih luas lagi berhubungan dengan penelitian empirik yang dibutuhkan dalam menyiapkan Naskah Akademik dan substansi yang harus diatur dalam UU. Terkait dengan penyusunan UU Pemindahan Ibukota Negara ini, kebijakan berbasis bukti sangat diperlukan dalam membahas kelayakan ibukota baru Indonesia di Provinsi Kalimantan Timur ditinjau dari perspektif pertahanan, keamanan, politik, pemerintahan dan hubungan luar negeri. Pentingnya kebijakan berbasis bukti diadopsi sebelum proses pemindahan ibukota dilakukan, agar masalah yang bersumber dari perkembangan lingkungan strategis yang mungkin dihadapi di ibukota negara yang baru itu dapat segera direspon. Dengan riset ini diharapkan pemindahan ibukota negara dapat mencapai tujuannya.

Tulisan ketiga membahas isu kesehatan dengan judul “Upaya Penurunan Angka Kematian Ibu Melalui Revisi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan”, yang ditulis oleh Sali Susiana dari Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. Tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) masih menjadi masalah di Indonesia. Hasil Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2015 yang dimuat dalam Profil Kesehatan Ibu dan Anak Tahun 2020 menunjukkan AKI sebesar 305 per 100.000 kelahiran hidup, masih jauh dari target tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* sebesar 70 per 100.000 kelahiran hidup. Berbagai upaya dilakukan pemerintah, namun AKI belum turun secara signifikan. Dari sisi regulasi selama ini hak kesehatan reproduksi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (UU Kesehatan). Namun pengaturan tentang hak kesehatan reproduksi dalam UU Kesehatan belum memadai karena belum mencakup pemeriksaan kesehatan antenatal yang sangat diperlukan oleh ibu hamil.

Tulisan keempat ditulis oleh Trias Palupi Kurnianingrum dengan judul "Pelindungan Hak Kekayaan Intelektual Atas Barang Impor Melalui Sistem Perekaman di Indonesia". Dalam rangka melakukan pengendalian ekspor impor terhadap barang yang diduga sebagai pelanggaran hak kekayaan intelektual (HKI), pemegang hak dapat melakukan upaya pencegahan melalui sistem perekaman yang dilakukan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Sistem perekaman dinilai dapat memberikan kontribusi pelindungan HKI dari serbuan barang impor. Melalui sistem perekaman, DJBC akan memiliki cukup data mengenai HKI sehingga akan membantu tugas DJBC dalam mengendalikan ekspor impor barang-barang hasil pelanggaran HKI. Tindakan ini dinilai cukup efektif guna menekan tingginya akan pemalsuan HKI. Sayangnya meskipun dinilai penting, mekanisme sistem perekaman masih mengalami kendala, di antaranya minimnya kesadaran pemegang hak untuk mendaftarkan HKI, belum terintegrasinya sistem, minimnya pengetahuan petugas bea cukai, ketidaksinkronan aturan.

Tulisan kelima berjudul "Perbankan Syariah: Urgensi Penghapusan Unit Usaha Syariah pada Tahun 2023" yang ditulis oleh Nidya Waras Sayekti dan Sony Hendra Permana dari Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. Di saat krisis akibat pandemi Covid-19, perbankan syariah masih memiliki kinerja yang positif. Namun demikian, perbankan syariah masih memiliki tantangan seperti penguatan struktur dan daya saing, layanan digital ketimpangan literasi dan inklusi keuangan, hingga transformasi pengaturan dan pengawasan. Salah satu upaya untuk meningkatkan daya saing perbankan syariah yaitu melakukan pemisahan Unit Usaha Syariah (UUS) pada bank induk konvensional menjadi Bank Usaha Syariah (BUS) dengan badan usaha tersendiri. Pemisahan UUS menjadi BUS dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain: *pertama*, memberikan pernyataan modal murni dari induk perusahaan. *Kedua*, bank induk melakukan konversi suatu bank kemudian mengalihkan aset UUS yang dimilikinya untuk menjadi BUS. *Ketiga*, menyatukan beberapa UUS menjadi BUS. Keempat, mengakuisisi aset UUS oleh BUS yang sudah ada. *Keempat*, cara tersebut dapat dipilih dengan menyesuaikan pada kondisi masing-masing bank induk serta UUS yang dimilikinya

Demikianlah kelima karya tulis ilmiah yang kami tampilkan pada jurnal Kajian Vol 26, No. 2 Tahun 2021. Kami harapkan tulisan-tulisan tersebut dapat memberikan manfaat bagi para pembaca. Selanjutnya kami tentu mengharapkan saran dan masukan dari para pembaca untuk penyempurnaan jurnal Kajian di edisi berikutnya. Redaksi juga mengucapkan terima kasih kepada Dr. Ria Tri Vinata SH., LL.M, Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum, Dr. Hilman Syahrial Haq, SH., LL.M, Dr. Ganewati Wuryandari, MA, dan Prof. Dr. Lili Romli, M.Si, sebagai mitra bestari atas koreksi dan masukannya terhadap semua tulisan dalam jurnal Kajian edisi kali ini.

Jakarta, Desember 2021

Redaksi

## **LEMBAR ABSTRAK**

Kata kunci yang dicantumkan adalah istilah bebas. Lembar abstrak ini boleh dikopi tanpa izin dan biaya.

---

Prayudi (Pusat Penelitian, Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia)

### **SURAT SUARA PEMILIH DAN LEGITIMASI PEMILU**

Kajian Vol. 26, No. 2, Tahun 2021, hlm.104-121

Salah satu aspek dari sistem pemilu yang berkaitan erat dengan kedaulatan rakyat adalah mengenai surat suara yang digunakan dalam Pemilu 2024. Melalui metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan konstruktif interpretivis, tulisan ini mencoba untuk mengungkapkan substansi dari beberapa perubahan dan tujuan surat suara pemilih yang digunakan dan memiliki kontribusi bagi legitimasi pemilu. Artikel ini berusaha menunjukkan bahwa penggunaan surat suara bukan hanya bersifat administrasi pemilu semata, tetapi juga menjadi bahan bagi bangunan legitimasi pemilu yang bermakna penting secara politik. Berdasarkan pendekatan rekonstruktif interpretivis terhadap rumusan masalahnya, direkomendasikan agar substansi surat suara legitimasi pemilu diarahkan pada akurasi pilihan pemilih terhadap para kandidat dan partai-partai yang bersaing. Ini memerlukan ada komitmen dari DPR dan pemerintah terhadap dukungan sumber daya penyelenggara pemilu, agar mampu mengawal dan mengadakan desain surat suara secara akuntabel.

*Kata Kunci: surat suara; legitimasi pemilu; kedaulatan rakyat; penyelenggara pemilu.*

## **KEBIJAKAN BERBASIS BUKTI DAN IBUKOTA BARU INDONESIA**

Kajian Vol. 26, No. 2, Tahun 2021, hlm. 122 - 139

*Evidence-based policy* (kebijakan berbasis bukti) semakin mengemuka dan memperoleh perhatian belakangan setelah banyak UU digugat oleh masyarakat sipil, terutama kelompok kepentingan, dan ajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk dikaji secara yuridis. Kasus-kasus *judicial review* UU yang baru saja disahkan DPR dan Pemerintah yang meningkat ini membuat kebijakan berbasis bukti dalam penyusunan UU sebagai sebuah proses kebijakan publik menjadi penting bagi politisi seperti halnya bagi akademisi di kampus-kampus. Persoalannya tidak hanya menyangkut teknik perancangan UU, tetapi lebih luas lagi berhubungan dengan penelitian empirik yang dibutuhkan dalam menyiapkan Naskah Akademik dan substansi yang harus diatur dalam UU. Terkait dengan penyusunan UU Pindahan Ibukota Negara ini, kebijakan berbasis bukti sangat diperlukan dalam membahas kelayakan ibukota baru Indonesia di Provinsi Kalimantan Timur ditinjau dari perspektif pertahanan, keamanan, politik, pemerintahan dan hubungan luar negeri. Penelitian dilakukan secara lintas-disiplin dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Pengumpulan data dilaksanakan dengan melakukan wawancara mendalam dan diskusi kelompok yang terbatas, serta kunjungan langsung ke lapangan, baik di ibukota lama Jakarta maupun baru Kalimantan Timur. Temuan memperlihatkan pentingnya kebijakan berbasis bukti diadopsi sebelum proses pindahan ibukota dilakukan, agar masalah yang bersumber dari perkembangan lingkungan strategis terkini yang mungkin dihadapi di ibukota negara yang baru itu dapat segera direspon. Dengan riset ini diharapkan pindahan ibukota negara dapat mencapai tujuannya, dan bukan memindahkan dan menciptakan masalah baru. Hasil penelitian ini merekomendasikan perlunya dilakukan pembahasan yang komprehensif dan mendalam atas hasil riset dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan terkait.

*Kata Kunci: pindahan ibukota; ibukota baru; kebijakan berbasis bukti; Jakarta; Kalimantan Timur.*



---

Sali Susiana (Pusat Penelitian, Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia)

## **UPAYA PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU MELALUI REVISI UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN**

Kajian Vol. 26, No. 2, Tahun 2021, hlm. 140-153

Tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) masih menjadi masalah di Indonesia. Hasil Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2015 yang dimuat dalam Profil Kesehatan Ibu dan Anak Tahun 2020 menunjukkan AKI sebesar 305 per 100.000 kelahiran hidup, masih jauh dari target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* sebesar 70 per 100.000 kelahiran hidup. Berbagai upaya dilakukan pemerintah, namun AKI belum turun secara signifikan. Dari sisi regulasi selama ini hak kesehatan reproduksi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (UU Kesehatan). Oleh karena itu, permasalahan dalam tulisan ini adalah: bagaimana pengaturan tentang kesehatan reproduksi dalam UU Kesehatan dan mengapa ketentuan tentang hak kesehatan reproduksi dalam UU Kesehatan perlu direvisi agar dapat mendukung upaya penurunan AKI? Hasil analisis yang dilakukan melalui studi literatur menunjukkan bahwa pengaturan tentang hak kesehatan reproduksi dalam UU Kesehatan belum memadai karena belum mencakup pemeriksaan kesehatan antenatal yang sangat diperlukan oleh ibu hamil. Oleh karena itu UU Kesehatan harus direvisi, dengan memasukkan hak pemeriksaan kesehatan antenatal sebagai bagian dari pelayanan kesehatan reproduksi kepada ibu hamil. Revisi UU Kesehatan sangat penting karena: (1) UU Kesehatan belum mengatur mengenai hak pemeriksaan kesehatan antenatal bagi ibu hamil; (2) negara wajib menjamin hak kesehatan reproduksi sebagai bagian dari hak asasi manusia; (3) AKI di Indonesia masih tinggi, sementara berbagai upaya penurunan AKI yang dilakukan hingga saat ini belum dapat memenuhi target penurunan AKI. Untuk mempercepat upaya penurunan AKI, pengaturan tentang hak pemeriksaan kesehatan antenatal bagi ibu hamil perlu diakomodasi ke dalam UU Kesehatan. Oleh karena itu, perlu dilakukan revisi terhadap UU Kesehatan sehingga hak pemeriksaan kesehatan antenatal bagi ibu hamil dapat diakomodasi dalam undang-undang tersebut.

*Kata kunci: kesehatan reproduksi; angka kematian ibu; Undang-Undang tentang Kesehatan.*

---

Trias Palupi Kurnianingrum (Pusat Penelitian, Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia)

## **PELINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL ATAS BARANG IMPOR MELALUI SISTEM PEREKAMAN DI INDONESIA**

Kajian Vol. 26, No. 2, Tahun 2021, hlm. 154-171

Dalam rangka melakukan pengendalian ekspor impor terhadap barang yang diduga sebagai pelanggaran hak kekayaan intelektual (HKI), pemegang hak dapat melakukan upaya pencegahan melalui sistem perekaman yang dilakukan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Sistem perekaman HKI adalah suatu sistem menggunakan instrumen digital untuk dapat melakukan pengendalian adanya dugaan barang impor hasil pelanggaran HKI. Artikel menggunakan metode penelitian yuridis empiris, membahas pelaksanaan sistem perekaman dan kendala di dalamnya. Analisa permasalahan menggunakan teori perlindungan hukum. Dalam pembahasan disebutkan bahwa sistem perekaman dinilai dapat memberikan kontribusi perlindungan HKI dari serbuan barang impor. Melalui sistem perekaman, DJBC akan memiliki cukup data mengenai HKI sehingga akan membantu tugas DJBC dalam mengendalikan ekspor impor barang-barang hasil pelanggaran HKI. Tindakan ini dinilai cukup efektif guna menekan tingginya akan pemalsuan HKI. Sayangnya meskipun dinilai penting, mekanisme sistem perekaman masih mengalami kendala, di antaranya minimnya kesadaran pemegang hak untuk mendaftarkan HKI, belum terintegrasinya sistem, minimnya pengetahuan petugas bea cukai, ketidaksinkronan aturan.

*Kata kunci: HKI; pelanggaran HKI; recordation system; perlindungan.*

## **PERBANKAN SYARIAH: URGENSI PENGHAPUSAN UNIT USAHA SYARIAH PADA TAHUN 2023**

Kajian Vol. 26, No. 2, Tahun 2021, hlm. 172-186

Perbankan syariah telah memiliki kinerja yang sangat baik. Bahkan di saat krisis akibat pandemi Covid-19, perbankan syariah masih memiliki kinerja yang positif. Namun demikian, perbankan syariah masih memiliki tantangan seperti penguatan struktur dan daya saing, layanan digital ketimpangan literasi dan inklusi keuangan, hingga transformasi pengaturan dan pengawasan. Salah satu upaya untuk meningkatkan daya saing perbankan syariah yaitu melakukan pemisahan Unit Usaha Syariah (UUS) pada bank induk konvensional menjadi Bank Usaha Syariah (BUS) dengan badan usaha tersendiri. Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, telah mengamanatkan Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS melakukan pemisahan UUS tersebut menjadi BUS setelah nilai aset UUS telah mencapai paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total nilai aset bank induknya atau 15 (lima belas) tahun sejak berlakunya Undang-Undang tersebut yakni di tahun 2023. Pemisahan ini bertujuan agar kinerja bank syariah menjadi lebih baik, lebih independen dalam menerapkan prinsip syariah, dan mudah dalam menggandeng investor atau melakukan *go public* untuk pengembangan bisnis syariah. Artikel ini bertujuan untuk melihat kebijakan apakah yang sebaiknya diambil oleh pemerintah dalam menyiapkan implementasi pemisahan UUS menjadi BUS. Metode penelitian yang digunakan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan menggunakan data sekunder yang bersumber dari berbagai referensi terkait *spin-off* bank syariah, baik melalui buku-buku tentang perbankan syariah, jurnal, peraturan perundangan yang berlaku, bahan webinar dan media lainnya. Pemisahan UUS menjadi BUS dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain: pertama, memberikan penyertaan modal murni dari induk perusahaan. Kedua, bank induk melakukan konversi suatu bank kemudian mengalihkan aset UUS yang dimilikinya untuk menjadi BUS. Ketiga, menyatukan beberapa UUS menjadi BUS. Keempat, mengakuisisi aset UUS oleh BUS yang sudah ada. Keempat cara tersebut dapat dipilih dengan menyesuaikan pada kondisi masing-masing bank induk serta UUS yang dimilikinya.

*Kata Kunci: perbankan syariah; pemisahan; unit usaha syariah; bank umum syariah; bank umum konvensional.*

---

## ***SHEET OF ABSTRACT***

*The keywords listed are accessible terms. This sheet of abstract may be copied without permission and fee.*

---

Prayudi (Pusat Penelitian, Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia)

### ***VOTER BALLOT PAPER AND ELECTION LEGITIMATIONS***

Kajian Vol. 26, No. 2, Tahun 2021, pp. 104-121

*One of the aspects of an election system which closely relate to the people sovereignty is about voter ballot that is going to be use in the 2024 elections. Through qualitative research methods with the use constructive interpretivist approach, this article tries to reveal the substances of several changes and aim of ballot design which using and have an elections legitimate contribution. These article tries to reveal that the use of ballot papers which not only an elections administrative purely, but also become a materials to the legitimations building of election which an important meaning by politics. Based on the constructivist interpretivist approach to the formulation of problems, this article recommends substance of ballot papers of an election legitimation directed toward an accuracy voter choices to the candidates and parties compete. Commitment of DPR and executive is required to support resources of an election organizers, to be able control and stage further voter ballot design accountably.*

*Keywords: ballot papers; election legitimations; people sovereignty; election organizer.*

***EVIDENCE-BASED POLICY AND INDONESIA'S NEW CAPITAL***

Kajian Vol. 26, No. 2, Tahun 2021, pp. 122-139

*Evidence based-policies have drawn public attention after interest groups sent many laws produced by DPR to the Constitutional Court to be reviewed. The reviews of laws that have just been passed by the parliament and the government have made evidence based-policies as important things for politicians so as to academicians in campuses. Their problems did not deal not only with technical issues or legal drafting, but also have relations with empirical research methods applied in the preparations of their Academic Draft and substances that must be stipulated in the laws. Regarding the current making of law on the New State Capital of the East Kalimantan Province, evidence based-policy is relevant to be approached from different perspectives of security, politics, government and foreign policy. This multi-discipline research is conducting by applying a qualitative method. Data is gathered through depth-interviews and focus groups discussions, as well as on site visits and observations, in both the old capital city of Jakarta and the will be new capital city of East Kalimantan. Findings revealed the important need of the evidence based-policy before the removal of the capital city of begin so that new challenges resulted from strategic environment change can be properly responded. With this empirical research it is expected that the removal can reach its main goal create a new and better capital city of the country, instead of creating of new problems for new governments in the future. It is recommended here that more comprehensive discussions of these research results involving various stakeholders should be followed up.*

*Keywords: capital city removal; new capital city; evidence based-policy; Jakarta; Kalimantan Timur.*

---

Sali Susiana (Pusat Penelitian, Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia)

***THE EFFORTS OF REDUCE MATERNAL MORTALITY THROUGH REVISION OF THE LAW NO. 36 OF 2009 ON HEALTH***

Kajian Vol. 26, No. 2, Tahun 2021, pp. 140-153

*The high maternal mortality rate (MMR) is still a problem in Indonesia. The results of the 2015 Inter-Census Population Survey (SUPAS) published in the 2020 Maternal and Child Health Profile show an MMR of 305 per 100,000 live births, still far from the Sustainable Development Goals target of 70 per 100,000 live births. Various efforts have been made by the government, but the MMR has not decreased significantly. From a regulatory perspective, reproductive health rights have been regulated in rule Law Number 36 Year 2009 concerning Health (Health Law). Therefore, the problem in this paper is: how is the regulation on reproductive health in the Health Law and why does the provision on reproductive health rights in the Health Law need to be revised in order to support efforts to reduce MMR? The results of the analysis conducted through a literature study show that the regulation on reproductive health rights in the Health Law is inadequate because it does not include antenatal health checks which are indispensable for pregnant women. Therefore, the Health Law must be revised, to include the right to antenatal health checks as part of reproductive health services for pregnant women. The revision of the Health Law is very important because: (1) the Health Law does not regulate the right to antenatal health checks for pregnant women; (2) the state is obliged to guarantee reproductive health rights as part of human rights; (3) MMR in Indonesia is still high, while various efforts to reduce MMR that have been carried out so far have not been able to meet the target for reducing MMR. To accelerate efforts to reduce MMR, the regulation on the right to antenatal health checks for pregnant women needs to be accommodated in the Health Law. Therefore, it is necessary to revise the Health Law so that the right to antenatal health checks for pregnant women can be accommodated in the law.*

*Keywords: reproductive health; maternal mortality rate (MMR); Law Number 23 of 2009 concerning Health*

---

Trias Palupi Kurnianingrum (Pusat Penelitian, Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia)

***THE PROTECTION OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS TO IMPORTED GOODS THROUGH RECORDATION SYSTEM IN INDONESIA***

Kajian Vol. 26, No. 2, Tahun 2021, pp. 154-171

*In order to control the export and import of goods suspected violating intellectual property rights (IPR), the owner of IPR can take preventive measure through recordation system that carried out at Directorate General of Customs and Excise (DGCE). The recordation system is a system which is using digital instrument to be able to control the alleged imported goods from IPR infringement. This article is using empirical judicial methods to discuss the implementation of recordation system and obstacle in it. Analysis of the problems uses the theory of legal protection. In this discussion, it is stated that recordation system is considered to be able to contribute to the protection of IPR from the invasion of imported goods. Through the recordation system, DGCE will have sufficient data regarding IPR so that it will assist DGCE's task in controlling export and import of goods resulting from IPR infringement. This action is considered quite effective in suppressing the high rate of counterfeit IPR. Unfortunately, the recordation system still experiences problems including the lack of awareness of the owner to register IPR, the system that not yet integrated, the lack of knowledge of customs officers.*

*Keywords: intellectual property rights (IPR); the violation of IPR; recordation system; the protection.*



**SHARIA BANKING: THE URGENCY OF REMOVING SHARIA BUSINESS UNITS IN 2023**

Kajian Vol. 26, No. 2, Tahun 2021, pp. 172-186

*Islamic banking has had an excellent performance. Even during a crisis due to the Covid-19 pandemic, sharia banking still has a positive performance. However, sharia banking still has challenges, such as strengthening structure and competitiveness, digital services for literacy inequality and financial inclusion, to regulatory and supervisory transformation. One of the efforts to increase the competitiveness of Islamic banking is to separate the Islamic Business Unit (UUS) from a conventional parent bank into a Sharia Business Bank (BUS) with its business entity. Furthermore, in Law Number 21 of 2008 concerning Islamic Banking, it has been mandated that Conventional Commercial Banks with UUS separate the UUS into BUS. This action is conducted after the UUS asset value reaches at least 50% (fifty percent) of the total asset value of the parent bank or 15 (fifteen) years since the law's enactment, namely in 2023. This separation aims to improve the performance of sharia banks, be more independent in applying sharia principles, and make it easier to partner with investors or go public for sharia business development. This article aims to see what policies should be taken by the government in preparing to implement the separation of UUS into BUS. The research method uses a qualitative descriptive approach using secondary data sourced from various references related to Islamic bank spin-offs through books on Islamic banking, journals, applicable laws and regulations, webinar materials, and other media. Separation of UUS into BUS can be done in several ways, including: first, by providing pure capital participation from the parent company. Second, the parent bank converts a bank and then transfers its UUS assets to become BUS. Third, uniting several UUS to become BUS. Fourth, acquiring UUS assets by existing BUS. These four methods can be chosen according to the conditions of each parent bank and the UUS it owns.*

*Keywords: sharia banking; spin off; sharia business unit; sharia common bank; konventional bank.*

